
Pergeseran Strategi Indonesia Dalam Sengketa Dengan Tiongkok Antara Tahun 2009 Dan 2022 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Di Perairan Natuna Utara

Dani Andreas Butar Butar

University of Reading, Inggris

email: daniandreasbutarbutar@gmail.com

ABSTRACT

The rising tension between Indonesia and China regarding the overlapping claim to the Natuna Sea had motivated this study. Interestingly, since the issue first occurred in 2009, Indonesia had been governed by two different administrations which were Yudhoyono (2009 to 2014) and Widodo (2014 to present).

This study attempted to examined the shift of each presidency's strategy to tackled the Natuna issue using literature review method with secondary data analysis.

Having analysed the three elements of strategy theory by Arthur Lykke – ends, ways and means – this study found that the shift had been occurred in all aspects. Widodo's primary intention (ends) in inward policy that emphasised on domestic interests then led its measures (ways) and tools (means) for tackling the Natuna waters issues more actual and firmer from the area of politics, economics, along with security and defence. The author then recommended Indonesian government to kept maintaining and strengthening inward and outward practices to rejecting China's claim and to affirming the ownership of the Natuna waters.

Keywords: *Strategy; Natuna Waters; Indonesia.*

ABSTRAK

Ketegangan yang meningkat antara Indonesia dan Tiongkok mengenai klaim tumpang tindih atas perairan Natuna telah mendorong penelitian ini. Menariknya, sejak isu ini pertama kali terjadi pada tahun 2009, Indonesia dipimpin oleh dua pemerintahan yang berbeda yaitu Yudhoyono (2009 hingga 2014) dan Widodo (2014 hingga sekarang).

Kajian ini mencoba menganalisis pergeseran strategi dari masing-masing pemerintahan dalam mengatasi isu Natuna dengan menggunakan metode *literature review* dengan analisis data sekunder.

Setelah menganalisis tiga elemen teori strategi oleh Arthur Lykke – tujuan, cara dan sarana – studi ini menemukan bahwa pergeseran telah terjadi di semua aspek. Tujuan utama (*ends*) Widodo melalui kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan dalam negeri diimplementasikan melalui cara (*ways*) dengan menggunakan alat (*means*) untuk mengatasi persoalan perairan Natuna secara lebih aktual dan tegas baik dari segi politik, ekonomi, serta keamanan dan pertahanan. Artikel ini kemudian merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk terus mempertahankan dan memperkuat praktik kebijakan ke dalam dan ke luar untuk menolak klaim Tiongkok dan menegaskan kepemilikan perairan Natuna.

Kata kunci: *Strategi; Perairan Natuna; Indonesia.*

PENGANTAR

Konflik maritim atas pulau, perairan, dan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan telah menarik perhatian global selama beberapa tahun terakhir (Fravel, 2011; Utami, 2022). Situasi mulai memanas pada tahun 2009 ketika pemerintah Tiongkok menyampaikan *Note Verbale* kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi peta penguasaan wilayah mereka di atas Laut Tiongkok Selatan dengan garis imajiner yang disebut *Nine-dash Line* (Ikeshima, 2013; Hellendorff dan Kellner, 2014; Connelly, 2020). Klaim tersebut tidak sesuai dengan peraturan maritim internasional yang dijelaskan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagaimana disebutkan oleh PBB bahwa hingga saat ini belum terdapat penjelasan yang sah mengenai dasar hukum dari klaim wilayah *Nine-dash line* (UN, 2010). Meskipun demikian, Tiongkok tetap mengklaim kepemilikannya terhadap wilayah tersebut hingga menimbulkan sengketa lebih lanjut dengan negara lain seperti sengketa Kepulauan Paracel dengan Vietnam (Chapman, 2016) dan sengketa Perairan Natuna dengan Indonesia (Muhibat, 2018; Suwarno dkk., 2021; Wood, 2021), seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.

Berkaitan dengan dasar kepemilikan Perairan Natuna, pemerintah Indonesia secara tegas mengklaim bahwa wilayah tersebut sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 (Muhibat, 2018). Sebaliknya, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa berdasarkan klaim sejarah masa lampau, bagian utara perairan Natuna merupakan daerah penangkapan ikan tradisional mereka. Oleh karena itu, Tiongkok menyatakan bahwa para nelayan dari negaranya telah sah apabila melakukan kegiatan

Gambar 1
Klaim Maritim Di Laut Tiongkok Selatan



Sumber: Chang, 2014.

perikanan di wilayah tersebut (Rabbani, 2019; Laksmana, 2020). Ketidakesuaian pemahaman yang selama ini menjadi fokus Tiongkok tersebut kemudian menyebabkan berlanjutnya sengketa di sekitar perairan Natuna Utara (Wood, 2021). Konflik tersebut tidak hanya mengungkap bahwa Tiongkok telah melanggar peraturan terkait dunia perikanan, namun yang lebih penting, juga menunjukkan bagaimana Tiongkok tidak mengakui hak kedaulatan Indonesia atas perairan Natuna (Prabowo, 2013). Perlu diketahui juga bahwa dalam beberapa kesempatan di tahun 2015, Tiongkok mengakui kepemilikan negara Indonesia atas perairan Natuna Utara (Muhibat, 2018). Namun, faktanya aktivitas perikanan ilegal masih ditemukan anggota TNI AL dan juga Bakamla di sekitar wilayah tersebut hingga insiden terakhir di akhir tahun 2019. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa negara Tiongkok belum sepenuhnya mengakui hak kedaulatan Indonesia atas perairan Natuna serta masih menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi insiden di Natuna masih dapat diselesaikan secara diplomatis.

Tabel 1
Insiden Antara Indonesia Dan Tiongkok di Perairan Natuna Utara Di Bawah Pemerintahan Yudhoyono (Tahun 2009 s.d. 2014)

No	Incident		The vessels of countries involved	
	Date	Details	Chinese vessels	Indonesian vessels
1	July 10, 2009	Indonesian seizes vessel and 75 fishermen, all but 16 of whom subsequently released and returned to China		
2	May 13, 2010	Violation of EEZ borders by a Chinese vessel	Yuzheng 302	KRI SRE-386
3	May 15, 2010	Indonesia seizes two fishing boats, but releases them when a Chinese patrol vessel intervenes	Yuzheng 301	KKP HIU 003 and KKP HIU 004
4	June 22, 2010	Interdiction of Ad hoc by a Chinese vessel	Yuzheng 303 and Yuzheng 311	KKP HIU 005
5	June 23, 2010	Provocation of a Chinese vessel	Yuzheng 303 and Yuzheng 311	KKP HIU 009 and KKP HIU 010, KRI Ahmad Yani and KRI Teuku Umar
6	March 26, 2013	Chinese vessel prevents seizure of a Chinese fishing boats by Indonesian patrol boat, arriving on scene after patrol boat had transferred crew to the Indonesian vessel	Yuzheng 310 and Nanfeng	KKP HIMA 001

Sumber: Prabowo, 2013; Riska, 2016; McRae, 2019.

Tabel 2
Insiden Antara Indonesia Dan Tiongkok Di Perairan Natuna Utara Di Bawah Pemerintahan Widodo (Tahun 2014 s.d. 2022)

No	Incident		The vessels of countries involved	
	Date	Details	Chinese vessels	Indonesian vessels
1	June 22, 2015	IUU fishing by Chinese fishermen	Shun Hang 618	KRI SSA-378
2	March 19, 2016	Intervention to Indonesian frigate vessel "HIU" by Chinese Coast Guard vessel for Indonesia had seized Chinese fishermen boats	Chinese Coast guard and Kway Frey 10078	KKP HIU 101
3	May 27, 2016	An Indonesian naval vessel seizes the Chinese fishing boat	Gui Be Yu 27088	KRI Oswald Siahaan 354
4	June 17, 2016	Indonesian naval vessel seizes one of 10-12 Chinese fishing boats near Natuna after firing a warning shot. Two Chinese coastguard vessel approaches but fails to secure release of the boat		KRI Imam Bonjol 383
5	December 24, 2019	Indonesian Maritime and Fisheries Ministry's vessels found Chinese coast guard escorting Chinese fishing boats around Natuna Sea	CCG 4301	KRI Tjiptadi-381
6	September 12, 2020	Indonesian Coast Guard ship spotted Chinese Coast Guard vessel in the northern Natuna Sea	CCG 5204	KN Nipah 321

Sumber: Riska, 2016; Weatherbee, 2017; Muhibat, 2018; McRae, 2019.

Indonesia selalu berupaya melakukan usaha dalam mengatasi masalah tersebut. Lebih lagi, sejak peristiwa laut Natuna pertama kali muncul pada 2009, Indonesia dipimpin oleh dua presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (dari 2009 hingga 2014) dan Joko Widodo (dari Oktober 2014 hingga sekarang; Presiden Indonesia saat ini). Adapun data mengenai insiden di perairan Natuna pada masing-masing pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 1 dan

Tabel 2. Masing-masing pemerintahan telah mengimplementasikan kebijakan sebagai upaya penanganan konflik batas wilayah maritim baik dengan *soft approach* maupun *hard approach*. Meskipun terdapat beberapa persamaan dalam pelaksanaannya, beberapa peneliti melihat bahwa terdapat perbedaan ataupun pergeseran dalam strategi yang diaktualisasikan.

Di bawah Yudhoyono, beberapa orang berpendapat bahwa pemerintah Indonesia

menekankan pada pendekatan diplomatik dan tidak berniat untuk melakukan tindakan pengambilan risiko karena kepentingan politik. Sebaliknya, berbeda dengan Yudhoyono, beberapa ahli berpendapat bahwa Widodo telah melakukan beberapa upaya yang kuat dan berani dalam menangani permasalahan batas laut ini. Apabila melihat dari sudut pandang yang lebih luas dengan mempertimbangkan pergeseran yang digambarkan melalui strategi masing-masing pemerintah, kita akan memahami bagaimana persepsi dari setiap pemerintahan tentang masalah ini dan bagaimana hal tersebut memengaruhi cara mereka dalam menanggapi kasus ini. Pergeseran ini patut dipertimbangkan mengingat sebagai negara yang berdaulat, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang cukup besar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya demi martabat bangsa.

Sebagian besar penelitian berfokus pada kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing presiden secara terpisah. Beberapa telah meneliti kebijakan Indonesia selama era Yudhoyono (2009-2014) sementara yang lain hanya berfokus pada pemerintahan Widodo dari Oktober 2014 hingga saat ini. Sangat sedikit penelitian yang menganalisis tentang bagaimana pergantian pemerintahan Indonesia memberikan perubahan kebijakan dalam menghadapi isu perairan Natuna. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang membandingkan kebijakan Indonesia terkait pelanggaran aktivitas perikanan antara sebelum dan sesudah tahun 2014 dengan fokus hanya di wilayah Indonesia secara umum dan bukan di sekitar perairan Natuna secara khusus. Oleh karena itu, studi ini bermaksud untuk mengisi *gap* tersebut dan memperluas penelitian sebelumnya yang berfokus pada

strategi masing-masing pemerintahan dengan menganalisis secara eksplisit kebijakan pemerintah dalam sengketa perairan Natuna secara komprehensif.

Berfokus pada upaya pemerintah Indonesia sejak peristiwa tersebut pertama kali muncul hingga saat ini, adapun pertanyaan yang mendasari penelitian ini adalah: “Bagaimana perubahan strategi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Laut Natuna dengan Tiongkok pada periode 2009 dan 2022?”. Sejalan dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pergeseran respon pemerintah Indonesia terhadap isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional, dalam hal ini pelanggaran hak kedaulatan Indonesia oleh Tiongkok atas Laut Natuna melalui perspektif ilmu keamanan internasional. Penggunaan teori Strategi oleh Arthur Lykke (Yarger, 2006), dan tiga komponen utamanya – *Ends* (Tujuan), *Ways* (Cara), dan *Means* (Sarana), akan membantu penelitian ini untuk memberikan analisis mendalam tentang bagaimana praktik yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia mengalami perubahan.

Artikel ini menekankan perlunya tinjauan literatur (*literature review*) sebagai salah satu metodologi penelitian kualitatif (McMillan dan Schumacher, 2001) dan juga menekankan pentingnya analisis data sekunder. Didefinisikan sebagai cara yang sistematis dalam mengumpulkan dan mensintesis penelitian yang ada (Baumeister dan Leary, 1997; Tranfield, Denyer dan Smart, 2003). Tinjauan literatur diyakini memberikan dasar yang kuat dari metode penelitian untuk “memajukan pengetahuan dan memfasilitasi pengembangan teori” (Webster dan Watson, 2002). Lebih jauh lagi, dengan mengumpulkan hasil dan

pemahaman dari studi empiris sebelumnya, metode tinjauan literatur dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan ‘kekuatan’ baru (Snyder, 2019). Selain menggunakan metode tinjauan literatur, artikel ini menggunakan analisis data sekunder untuk menelaah data dan informasi yang ada dengan pembeda atau pemahaman baru (Irwin, 2013; Corti, 2018). Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan berasal dari buku-buku yang relevan, artikel jurnal yang telah terbit, berita online dari kantor resmi pemerintah negara, dan dokumen resmi pemerintah. Kebijakan resmi, seperti kebijakan kementerian, didapatkan melalui situs resmi pemerintah Indonesia, yang berarti data yang ditelaah dalam penelitian ini lebih valid.

PEMBAHASAN

Ends (Tujuan): Kesamaan Visi Yang Dijalankan Melalui Misi Yang Berbeda

Pertama, pertimbangan akan hak berdaulat sebagai prioritas utama.

Upaya melakukan aksi sebagai respon atas penolakan klaim *Nine-dash Line* milik Tiongkok dan klaim pemilikan atas perairan Natuna, baik Yudhoyono maupun Widodo mengedepankan satu tujuan imperatif, yaitu menjaga hak berdaulat (*sovereign right*) demi martabat bangsa. Hak berdaulat, menurut UNCLOS 1982, diberikan kepada suatu negara berkaitan dengan kepemilikan wilayah ZEE yang diukur hingga sejauh 200 mil laut dari garis pangkal (United Nations, 1982). Secara geografis, luas Laut Natuna terletak di bawah 200 mil laut dari garis pangkal Indonesia, sehingga menandakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat dan hak kuasa atas perairan Natuna.

Mengenai kebijakan dan upaya yang dilakukan, kedua presiden telah menunjukkan

kepada publik keseriusan dalam menangani masalah yang telah terjadi (baik aktivitas ilegal nelayan maupun pelanggaran hak berdaulat). Hal tersebut terlihat dari kebijakan sekuritisasi yang telah dilakukan melalui berbagai implementasi strategi pertahanan negara yang bersifat defensif aktif, di mana upaya pertahanan negara tidak dilakukan dengan melakukan penyerangan agresi terhadap negara lain, namun lebih cenderung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan secara aktif terhadap segala ancaman kedaulatan negara sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (LIPI, 2013).

Yudhoyono memprakarsai kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) (Kementerian Pertahanan RI, 2010) dalam rangka mengangkat dan memodernisasi kekuatan militer Indonesia, baik di darat (TNI AD), laut (TNI AL) maupun udara (TNI AU) (Sudirman dkk., 2019). Di satu sisi, tujuan utama inisiasi MEF tidak hanya ditujukan untuk sengketa Natuna, tetapi secara umum untuk kepentingan pertahanan negara. Di sisi lain, dampak dari realisasi MEF telah membantu pemerintah Indonesia dalam mengamankan kawasan dari ancaman dengan memperkuat kekuatan militer dengan mengerahkan pasukan dan peralatan di sana. Ini menandakan bahwa isu yang mengancam hak berdaulat Indonesia membuat pemerintah mengambil tindakan serius. Senada dengan itu, berbagai pendekatan mulai dari pertahanan hingga pendekatan ekonomi juga dilakukan oleh pemerintahan Widodo dengan satu tujuan untuk kepentingan bangsa (Lundry, 2018; McRae, 2019).

Meski memiliki tujuan yang sama dalam hal mempertahankan hak berdaulat Indonesia atas ZEE, peneliti melihat

terjadinya pergeseran strategi antara kedua pemerintahan. Yudhoyono tidak menempatkan isu maritim dalam program prioritasnya, sementara Widodo berhasil menunjukkan kesiapsiagaannya terkait isu-isu terkait maritim (Kemenhan RI, 2015) termasuk yang berkaitan dengan sengketa wilayah melalui kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia atau *Global Maritime Fulcrum* (GMF) (Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2017) yang disampaikan oleh Widodo dalam *The 9th East Asia Summit* pada bulan November 2014 dengan 5 (lima) area utama (Connelly, 2015), yaitu: (1). Budaya maritim Indonesia; (2). Pengelolaan sumber daya maritim, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan; (3). Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; (4). Diplomasi maritim; dan (5). Pembentukan kekuatan pertahanan maritim.

Selain itu, Widodo juga memperkuat visinya di bidang keamanan maritim dengan mengkodifikasi dan memperluas pilar-pilar tersebut di atas menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Laksmana, 2017; Lundry, 2018). Dalam peraturan tersebut, GMF didefinisikan sebagai 'negara maritim yang berdaulat, maju, dan kuat yang mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan keamanan kawasan dan dunia, sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2017). Di dalam pilar No. 4 yaitu memajukan diplomasi maritim, Widodo telah berusaha untuk memperhatikan batas luar Indonesia untuk menjaga kedaulatan nasional dan juga hak berdaulat sebagai upaya

antisipasi terhadap setiap pelanggaran terkait sengketa wilayah, mengingat beberapa konflik perbatasan terjadi selama pemerintahan Yudhoyono antara Indonesia dan Malaysia, seperti sengketa Sipadan dan Ligitan dan konflik Ambalat.

Kepedulian terhadap isu kemaritiman sudah menjadi agenda sejak Oktober 2014 saat Widodo dilantik sebagai presiden, jauh setelah insiden terakhir di Laut Natuna yang terjadi pada Maret 2013 di bawah pemerintahan Yudhoyono. Sebaliknya, dalam pemerintahannya, Yudhoyono mengangkat isu keamanan maritim ke publik hingga Juni 2009 ketika aktivitas ilegal oleh nelayan Tiongkok di Natuna ditemukan dan pada tahun 2010 ketika Beijing mengajukan *Note Verbale* ke PBB mengenai peta *Nine-dash Line* dengan Laut Natuna tertera di dalam peta tersebut. Melihat fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran antara kedua pemerintahan dalam hal kesiapan menangani isu-isu maritim. Pemerintah di bawah Yudhoyono memiliki sedikit perhatian dan melakukan sedikit persiapan sampai ancaman muncul, sedangkan Widodo telah membangun visi dan misi terkait isu maritim bahkan sebelum risiko atau ancaman tersebut terjadi. Namun demikian, terlepas dari perubahan yang teridentifikasi, baik Yudhoyono maupun Widodo telah berhasil menunjukkan kepada publik bahwa persoalan perairan Laut Natuna tidak dapat dinegosiasikan karena berkaitan dengan identitas Indonesia sebagai negara berdaulat.

Kedua, upaya Membangun Citra: dari kepentingan ke luar dan dalam negeri. Yudhoyono mengerahkan upaya penyelesaian isu Laut Tiongkok Selatan secara umum dan isu Laut Natuna secara khusus dengan cenderung menonjolkan bagaimana kesan negara asing terhadap Indonesia. Sejalan

dengan kebijakan luar negerinya mencapai *a thousand friends and zero enemies* (seribu teman dan tidak ada musuh) (Sulaiman, 2019), Yudhoyono menunjukkan pentingnya membangun citra positif agar dilihat oleh negara lain sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan juga hubungan kerja sama (Inayati, 2016). Artinya, hubungan antar negara ke depan, baik bilateral maupun multilateral, akan lebih mudah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya diplomasi proaktif yang meningkat pada tahun 2012 yang menghasilkan draft *Code of Conduct* (CoC) untuk negara-negara ASEAN dan Tiongkok (Connelly, 2016).

Meskipun secara teknis bukan ternasuk dalam negara penggugat dalam sengketa tersebut, Indonesia berusaha untuk menggambarkan kontribusi dan partisipasinya dalam diplomasi kawasan dan yang lebih penting, Indonesia berusaha untuk meningkatkan citra positifnya ke negara-negara lain. Lebih lanjut, Connelly (2016) juga menegaskan bahwa Yudhoyono lebih memprioritaskan kepentingan ke luar daripada ke dalam. Artikel ini selanjutnya berargumen bahwa Yudhoyono terkesan terlalu antusias dalam hal diplomasi multilateral untuk kepentingan multilateral daripada kepentingan nasional Indonesia. Pada dasarnya, keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2012 hingga 2013 tidak terlalu berdampak bagi Indonesia. Upaya tersebut akhirnya membantu konflik regional di antara negara-negara penggugat atas Laut Tiongkok Selatan (Prabowo, 2013) tanpa memberikan perhatian domestik pada konflik di sekitar perairan Natuna.

Berbeda dengan Yudhoyono yang menonjolkan pembangunan citra yang baik dari negara asing terhadap Indonesia, Widodo

dan pemerintahannya tidak menjadikan hal tersebut yang paling utama. Melalui inisiasi pendirian pangkalan militer di Natuna, pembentukan Kogabwilhan I untuk kawasan khusus sekitar Natuna, Rapat Kabinet di kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Imam Bonjol di perairan Natuna tahun 2006, kunjungan ke Natuna Januari lalu menyusul pertengahan Desember insiden, dan keseriusan dalam mengembangkan sumber daya alam Natuna (Suwarno dkk., 2021), Widodo telah melakukan tindakan yang lebih berani dan dapat dikatakan lebih tegas dari Yudhoyono. Artikel ini ingin membuktikan bahwa Widodo cenderung tetap mengejar kebijakan ke dalam dengan melakukan upaya-upaya nyata yang berdampak khusus pada kehidupan rumah tangga masyarakat, dalam hal ini Natuna (Sulaiman, 2019). Sebagian besar langkah Widodo dimaksudkan untuk terkait dengan insiden di Natuna dan bukan sengketa kawasan di Laut Tiongkok Selatan seperti yang dilakukan Yudhoyono. Terlebih lagi, Widodo telah melakukannya tanpa didasari rasa takut apakah sifat asertif tersebut akan menghilangkan potensi kerja sama dan hubungan dengan negara asing. Nyatanya, kemitraan strategis antara Indonesia dan negara-negara adidaya tetap berlangsung. Lebih lagi, pemerintah asing melanjutkan dan bahkan meningkatkan kemitraan strategis mereka dengan Indonesia (Laksmna, 2019).

Ways (Cara): Strategi Pertahanan Nasional Melalui 3 (Tiga) Pendekatan

Pertama, pendekatan Aspek Pertahanan dan Keamanan. Dari sisi pertahanan dan keamanan, meski berbagai pendekatan keras telah dilakukan sejak pemerintahan Yudhoyono, seperti MEF dan latihan militer tahunan di Natuna, Widodo dan Menhan

terlihat lebih tegas dengan tidak hanya melanjutkan konsep sebelumnya tetapi juga dengan menginisiasi dan mendirikan pangkalan militer berupa Kogabwilhan yang salah satunya secara khusus berfokus pada pengamanan wilayah Natuna.

Yudhoyono memprakarsai pembentukan MEF serta peningkatan anggaran militer untuk mencapai tujuan pertahanan yang meningkat secara signifikan dari tahun 2009. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang dilakukan pada awalnya ditujukan untuk menyeimbangkan kekuatan militer nasional dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Ini tidak dirancang untuk mempertahankan daerah yang paling terancam seperti daerah terluar khususnya. Meskipun fasilitas militer telah dimodernisasi, terutama kapal perang angkatan laut dan pesawat udara yang juga dikerahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan di Natuna, upaya tersebut tampaknya tidak menyurutkan perilaku agresif Beijing dalam hal mengklaim bagian utara Natuna sebagai milik mereka. Hal ini dapat dilihat dari insiden-insiden penggunaan pukot harimau dalam aktivitas perikanan oleh nelayan Tiongkok yang ditemukan selama tahun 2009 dan 2010, padahal kekuatan pertahanan telah diperkuat. Namun, fokus dalam penelitian bukan untuk mengetahui efektivitas langkah-langkah yang digunakan untuk meniadakan klaim Tiongkok atas Natuna, melainkan untuk memperdalam pemahaman tentang ketegasan strategi pemerintah Indonesia dalam menangani isu perairan Natuna.

Berbeda dengan Yudhoyono, tidak diragukan lagi bahwa pemerintahan Widodo telah memberikan upaya militer yang lebih nyata dan berani dalam menanggapi masalah batas laut ini. Mengikuti kebijakan MEF yang

berasal dari era sebelumnya, Widodo juga bermaksud untuk memodernisasi kemampuan pertahanan Indonesia dengan meningkatkan kebijakan MEF. Melalui kebijakan tersebut, Widodo bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan pertahanannya dengan meningkatkan anggaran untuk pembelian dan produksi peralatan militer (Sudirman dkk., 2019). Visi tersebut juga dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 yang dikodifikasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai salah satu pandangan strategis sentral yang mencatat bahwa modernisasi sistem pertahanan sangat penting untuk mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi.

Penambahan fasilitas militer menandakan bahwa Widodo memiliki kesadaran yang lebih besar tentang masalah ini dan bahkan telah memutuskan untuk membangun kekuatan militer di Natuna untuk mempertahankannya dari ancaman maspan, terlepas dari apa yang mungkin dipikirkan oleh negara lain. Terlepas dari banyaknya fokus dari Buku Putih Pertahanan, Widodo melalui GMF mendorong pemerintah untuk tidak mengabaikan keamanan maritim, khususnya terkait konflik di sekitar perbatasan terluar dan pulau-pulau terluar (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Oleh karena itu, perairan Natuna dan daerah sekitarnya, yang terletak lebih dari 212 mil laut dari ujung barat laut pulau Kalimantan (Kapoor dan Jensen, 2016), termasuk dalam wilayah ZEE Indonesia dan wajib untuk dipertahankan.

Lebih lanjut, inisiasi Kogabwilhan juga menggambarkan bagaimana pemerintah menyikapi persoalan Natuna dengan lebih serius (Suwarno dkk., 2021). Menurut Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI, setiap Kogabwilhan

yang dipimpin oleh jenderal bintang tiga bertanggung jawab atas wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia (Eksa, 2019). Dengan 34 provinsi Indonesia tersebut, TNI kemudian membagi Komando menjadi tiga wilayah yang memiliki tanggung jawab ancaman di udara, darat dan laut di wilayahnya masing-masing (Eksa, 2019). Kogabwilhan II dan III meliputi Indonesia bagian tengah dan timur, sedangkan Kogabwilhan I yang berkedudukan di Kepulauan Riau mengawasi Indonesia bagian barat. Widodo menegaskan bahwa fokus Komando I adalah ancaman terhadap Selat Malaka dan Laut Natuna Utara (Tiola, 2020). Pernyataan tersebut diperkuat dengan peresmian pangkalan militer baru di Natuna Besar, yang terbesar dari beberapa ratus pulau kecil di Laut Tiongkok Selatan (Laksmana, 2019). Kogabwilhan I yang berkedudukan di Kepulauan Natuna dipimpin oleh seorang jenderal angkatan bersenjata bintang dua yang posisinya secara struktural berada di bawah Panglima TNI. Menempatkan pemimpin dengan pangkat ini menggambarkan betapa vital dan mendesaknya wilayah tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa Widodo secara sadar menganggap bahwa pengamanan di wilayah perairan Natuna perlu diperkuat.

Terakhir, rapat kabinet yang dilakukan Widodo di kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Imam Bonjol dengan beberapa menteri terkait pasca-insiden Juni (Connelly, 2020) merupakan sebuah langkah yang kuat yang tidak pernah dilakukan di era Yudhoyono. Widodo melakukan rapat kabinet di atas kapal perang KRI Imam Bonjol bersama para menteri terkait yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kepala TNI, Kapolri dan lainnya (Almutaqqi, 2019). Melalui pertemuan ini Widodo bermaksud

untuk menunjukkan bagaimana Indonesia menganggap serius pelanggaran hak berdaulat Indonesia terkait ZEE (Kapoor dan Jensen, 2016; Connelly, 2016). Hasil pertemuan tersebut beragam, dan dari sisi pertahanan dan keamanan, Widodo menegaskan bahwa kemampuan militer untuk mengamankan laut harus ditingkatkan juga teknologinya (Kapoor dan Jensen, 2016). Serangkaian tindakan tersebut merupakan upaya proaktif pemerintah Indonesia yang mengakibatkan tidak adanya nelayan asal Tiongkok di perairan Natuna sejak pertemuan tersebut terjadi pada tahun 2016 hingga 2019 (Connelly, 2020).

Dengan melihat penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa di satu sisi, baik Yudhoyono maupun Widodo telah meningkatkan kekuatan pertahanan di Natuna untuk mengamankan dan melindungi kawasan tersebut tanpa ada niat untuk berperang dengan Beijing, terlepas dari kebijakan pemerintahan Yudhoyono yang *outward-focused* dan kebijakan pemerintahan Widodo yang *inward-focused*. Di sisi lain, saat pemerintahan Yudhoyono berupaya untuk mempertahankan upaya yang lebih nya terkait kebijakan ke luar negeri, pemerintahan Widodo telah menerapkan kebijakan 'ke dalam' dengan melakukan upaya keamanan dan pertahanan yang berani dan tegas, menunjukkan kepada kita bagaimana pemerintah konsisten dalam menjaga domestiknya.

Kedua, pendekatan Aspek Diplomatik. Terkait dengan kebijakan multilateral Indonesia, pendekatan Indonesia terhadap masalah batas laut ini telah berubah dari sebagai pemain proaktif dan sebagai negosiator untuk tujuan membangun solusi damai di kawasan menjadi fokus khusus untuk melindungi kepentingannya yang lebih sempit di sekitar Natuna (Connelly, 2016; Prabowo, 2013). Artikel ini menemukan bahwa di bawah

Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Natalegawa, secara aktif memainkan peran mulai dari membahas norma formal regional hingga menjadi tuan rumah lokakarya teknis informal dan pertemuan bersama ASEAN-Tiongkok. Sementara itu, di bawah Widodo, Indonesia kurang aktif dalam konferensi bersama regional yang berfokus pada Laut Tiongkok Selatan. Meskipun alasan utama untuk hal ini belum ditemukan, penelitian ini berpendapat bahwa mengakui Indonesia sebagai *non-claimant state* menandakan bahwa Widodo tidak memiliki kepentingan yang signifikan di Laut Tiongkok Selatan secara umum.

Dalam hal tanggapan diplomatik sepihak, penyerahan *Nota Verbale* kepada Sekjen PBB yang memperdebatkan ambiguitas klaim *Nine-dash line* atas Laut Tiongkok Selatan terjadi pada tahun 2010 di bawah Yudhoyono dan pada tahun 2016 dan 2020 di bawah pemerintahan Widodo. Namun demikian, Widodo melakukan gerakan yang lebih kuat melalui para menterinya yang tidak pernah dilakukan dalam pemerintahan Yudhoyono. Dalam rangka menanggapi insiden di perairan Natuna pada Desember 2019, Jakarta menerapkan pendekatan diplomasi bilateral dengan mengirimkan nota protes diplomatik kepada pejabat Beijing. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan protes terhadap aktivitas ilegal (*IUU fishing*) yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di ZEE Indonesia tepatnya di sekitar perairan Natuna dengan alasan bahwa Beijing telah melanggar hak kedaulatan Indonesia yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 (Ng, 2020). Selain itu, Marsudi juga mengungkapkan kemarahannya atas penjaga pantai Tiongkok yang menghalangi proses penegakan hukum terkait kapal nelayan tersebut (Connelly, 2020). Sebelumnya, pada masa jabatan pertamanya sebagai Menteri

Luar Negeri (2014-2019), Marsudi melakukan hal yang sama dalam menanggapi aktivitas kapal pukat Tiongkok di sekitar Natuna pada 2016. Melalui nota diplomatik itu, Indonesia menyampaikan pesan tegas bahwa Beijing telah melanggar dan harus menghormati UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Beijing. Sayangnya, juru bicara Beijing membalas nota diplomatik tersebut dengan membenarkan bahwa nelayan Tiongkok yang melakukan aktivitas perikanan secara legal karena berada di wilayah *Nine-dash Line* milik Tiongkok (Connelly, 2016).

Selain itu, pergeseran lain juga teridentifikasi dalam kemitraan strategis yang dilakukan Indonesia dalam menangani isu Natuna. Apabila Yudhoyono cenderung untuk fokus pada kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan (khususnya ASEAN) karena sifatnya yang proaktif dalam penyelesaian Laut Tiongkok Selatan, Widodo memutuskan untuk memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara asing di luar kawasan termasuk Australia, Inggris, Belanda dan AS, yang berdampak khusus pada perkembangan Natuna. Hal ini sejalan dengan kebijakan Widodo yang membumi (atau Diplomasi Membumi) yang menekankan pentingnya kepentingan dalam negeri berbeda dengan Yudhoyono. Dengan memanfaatkan kemitraan strategis dengan negara-negara asing untuk mencapai tujuan diplomasi yang membumi.

Langkah-langkah diplomasi yang kuat dan tegas oleh Widodo telah membantu kita memahami bahwa Widodo selalu ingin mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam menangani segala bentuk persoalan. Lebih jauh lagi, *learning point* dari pemahaman ini bukan hanya tentang pergeseran yang telah terjadi dalam hal tindakan yang dilakukan, tetapi yang lebih penting adalah konsistensi

Widodo dalam mencapai *inward policy* yang bertolak belakang dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Yudhoyono.

Ketiga, pendekatan Aspek Ekonomi.

Salah satu dampak buruk dari isu Natuna adalah kerugian ekonomi akibat aktivitas Perikanan illegal yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok. Mempertimbangkan dampak ekonomi, baik Yudhoyono maupun Widodo melakukan upaya yang berbeda secara signifikan dengan memanfaatkan sumber daya alam Natuna. Terletak di bagian selatan Selat Malaka dan merupakan sumber minyak dan gas alam Asia Timur Laut, Laut Natuna diklaim memiliki kandungan gas alam dan minyak yang melimpah (Keck, 2014). Namun, mengingat telah memasok hampir setengah dari cadangan gas alam Indonesia sekitar 1,3 TCM, *International Energy Administration* (IEA) mengklaim bahwa blok tersebut kurang berkembang dan belum dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia (Keck, 2014; Akmal, 2015). Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk mendorong perusahaan minyak dan gas dalam negeri agar dapat mengembangkan sumber dayanya. Pada tahun 2010, melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang secara resmi ditandatangani untuk melanjutkan produksi minyak di sebagian Laut Natuna, Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta dalam negeri PT. Khatulistiwa Energi untuk menghasilkan sumber daya alam, khususnya minyak di wilayah Laut Natuna. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, eksplorasi dilakukan pada tahun 2013 dan setahun kemudian Pertamina juga mengembangkan lapangan gas di sekitar perairan Natuna dengan beberapa perusahaan lain, seperti Exxon Mobil Corp, Total SA, dan

PTT Exploration Production (Marshall, 2014). Kemajuan strategi ini telah berjalan dengan baik dan eksplorasi sumber daya tersebut telah dilakukan secara memadai.

Lebih lanjut, Widodo melalui Menteri Perikanan dan Kelautan telah berhasil membentuk Pusat Kelautan dan Perikanan Terpadu yang bertujuan tidak hanya sebagai wujud kehadiran di wilayah klaim tumpang tindih tetapi juga untuk membantu nelayan tradisional dalam menyimpan dan memproduksi hasil tangkapan mereka untuk meningkatkan ekonomi lokal (Ambari, 2019). Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah Indonesia untuk menggenjot insentif negara asing untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, khususnya di kawasan Natuna. Mengingat bagaimana Indonesia berpegang pada kebijakan luar negeri ,bebas dan aktif' dan merupakan negara non-blok, pemerintah telah banyak menyerukan investasi oleh negara lain, baik di dalam maupun di luar kawasan. Hal ini menandakan bahwa wilayah Natuna benar-benar merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Selain itu, atas dasar hak berdaulat terhadap ZEE, Indonesia berhak mengeksplorasi seluruh sumber daya dalam wilayah perairan Laut Natuna.

Berkaitan dengan kebijakan strategis dalam penanganan isu Laut Natuna dari aspek ekonomi, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan yang cukup besar dalam upaya ekonomi Indonesia sejak era Yudhoyono. Perubahan tersebut tidak hanya ditandai dengan langkah-langkah yang dilakukan: di saat Yudhoyono hanya fokus pada minyak dan gas sebagai bagian dari usaha domestik, Widodo mengubah strategi dengan memanfaatkan perikanan selain mendapatkan kontribusi dari luar negeri. Lebih penting lagi, pergeseran itu juga

tergambar dari praktik pemberdayaan fisik dan non fisik yang dilakukan Widodo yang menekankan pada pengembangan sumber daya laut Natuna. Melalui eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya tersebut, Widodo berharap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam membuktikan dan mempertahankan kepemilikan Indonesia atas Natuna. Strategi ini membuktikan bahwa dari aspek ekonomi, Widodo tetap melakukan upaya strategi yang tegas dan nyata dalam mengimplementasikan visi yang dimiliki untuk fokus pada asas kemanfaatan ke dalam negeri.

Tools (Alat): Pemanfaatan Sumber Daya Yang Lebih Kuat

Berkaitan dengan penanganan permasalahan tumpang tindih wilayah maritim: klaim *Nine-dash Line* oleh Tiongkok dan ZEE yang diklaim Indonesia, Yudhoyono dan Widodo telah mengungkapkan adanya tujuan dan maksud yang sama, lebih tepatnya untuk mempertahankan hak berdaulat Indonesia atas kepemilikan wilayah perairan dalam ZEE. Namun demikian, artikel ini berpendapat bahwa tidak perlu ada yang dipertanyakan lagi terkait kemajuan-kemajuan selama pemerintahan Widodo, terlebih dalam pemanfaatan strategi-strategi yang digunakan dalam penanganan konflik ini.

Ditinjau dari aspek pertahanan, Widodo telah memaksimalkan kekuatan baik militer maupun non-militer, di mana ini menggambarkan kemajuan yang lebih serius dibandingkan dengan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya yang hanya mengandalkan kekuatan militer. Hal tersebut menandakan bahwa Yudhoyono bermaksud untuk menekankan keterlibatan TNI sebagai alat utama untuk mengamankan wilayah yang disengketakan. Menonjolkan kekuatan militer

tidaklah cukup untuk melakukan tindakan yang diambil untuk melawan ancaman biasa (Sudirman dkk., 2019). Sebaliknya, kinerja pemerintahan Widodo yang ditunjukkan dengan memaksimalkan keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menandakan bahwa menggabungkan kekuatan militer dan non-militer adalah langkah komprehensif untuk mengatasi masalah batas laut yang krusial ini.

Berdasarkan perspektif diplomasi, pengiriman *Nota Verbale* sebagai alat diplomasi tampaknya tidak lebih kuat dari pengiriman nota diplomatik protes kepada pejabat Tiongkok. Widodo, alih-alih menggunakan *Note Verbale* yang memiliki makna 'halus', cenderung menggunakan alat non-verbal yang lebih tegas dengan mengirimkan nota tertulis protes (Connelly, 2020) kepada pemerintah Tiongkok yang mengandung tingkat ketegasan yang lebih tinggi karena telah menilai bahwa menggunakan upaya verbal tampaknya tidak efektif untuk meredam Beijing perilaku agresif yang dilakukan oleh Tiongkok.

Hal ini juga terjadi pada aspek ekonomi, di saat Yudhoyono hanya menekankan pada pemanfaatan UMKM, Widodo menekankan pada kontribusi negara baik dalam maupun luar negeri terkait dengan pengembangan sumber daya alam yang ada di perairan Natuna. Hal terakhir ini menandakan adanya perbedaan, kemajuan, dan juga ketegasan strategi Widodo di laut Natuna. Lebih lagi, keterlibatan negara dengan kekuatan menengah (*middle-power groups*) seperti Jepang, Korea Selatan dan Belanda, dan negara-negara adidaya seperti AS, yang merupakan 'saingan' inti Tiongkok, telah membuktikan betapa beraninya Widodo dalam upayanya mempertahankan hak berdaulat di ZEE Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan dalam studi ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, sejak tahun 2009 di bawah pemerintahan Yudhoyono hingga masa kepresidenan Widodo saat ini, ditemukan adanya beberapa pergeseran signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan kedaulatan di perairan Natuna. Tetapi, meskipun terdapat implikasi positif yang ditemukan dari hasil penelitian ini, yaitu ketegasan upaya Widodo dalam mempertahankan hak berdaulat atas perairan Natuna yang membuat pemerintah Indonesia terlihat lebih serius dalam menyelesaikan keamanan maritim, perlu diperhatikan bahwa strategi dalam masa pemerintahan Yudhoyono tidak boleh diremehkan, khususnya strategi dalam bidang militer serta tindakan positif Indonesia dalam aspek diplomasi.

Selanjutnya, dalam rangka menambah kebermanfaatannya, kajian ini menyarankan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia khususnya terkait praktik ke dalam dan ke luar negeri yang menekankan pada penolakan klaim Tiongkok atas Perairan Natuna, serta penguatan tentang kepemilikan Indonesia atas perairan Natuna.

Pertama, pengembangan kehidupan ekonomi di sekitar Pulau Natuna serta meningkatkan infrastruktur keamanan dan militer merupakan tugas utama yang harus terus dilakukan pemerintah Indonesia, apalagi keduanya sudah tercantum dalam agenda nasional kepresidenan saat ini.

Kedua, Indonesia juga perlu mempertahankan dan memperkuat kemitraan strategisnya dengan negara-negara asing di luar kawasan termasuk Australia, Inggris, Belanda,

dan AS, untuk pengembangan Natuna. Tindakan-tindakan tersebut menggambarkan bahwa permasalahan Natuna selalu menjadi perhatian Indonesia dan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan patah semangat dalam memperjuangkan kedaulatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A., 2015, "Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan terkait Konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2009-2014", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, hh. 1-12.
- Almutaqqi, A. I., 2019, "Indonesia's Foreign Policy: Lessons from Five Years under the Jokowi Government" in Salim, Z. (ed.)" in *Evaluasi dan Agenda Pemerintahan Jokowi (2014-2024)*, Jakarta: The Habibie Centre, hh. 90-108.
- Ambari, A., 2019, *SKPT Natuna, Pusat Ekonomi Baru di Ujung Utara Indonesia*. Available at <<https://www.mongabay.co.id/2019/10/10/skpt-natuna-pusat-ekonomi-baru-di-ujung-utara-indonesia/>>
- Baumeister, R. F., dan Leary, M. R., 1997, "Writing narrative literature reviews", *Review of General Psychology*, Vol.1, hh. 311-320.
- Chang, F.K., 2014, *Even Indonesia: Concerns over China's Reach in the South China Sea*. Available at: <<https://www.fpri.org/article/2014/10/even-indonesia-concerns-over-chinas-reach-in-the-south-china-sea/>>.
- Chapman, B., 2016, "China's Nine-Dashed Map: Continuing Maritime Source of Geopolitical Tension", *Geopolitics*,

- History, and International Relations*, Vol. 8, No. 1, hh.146-168.
- Connelly, A. L., 2015, 'Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges', *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 37, No.1, hh. 1–28.
- Connelly, A. L., 2016, *Indonesia in the South China Sea: Going it alone*. Available at: <<https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-south-china-sea-going-it-alone>>
- Connelly, A. L., 2020, "Indonesia and the South China Sea Under Jokowi", *Asia-Pacific Regional Security Assessment 2020*, hh. 103–117.
- Corti, L., 2018, "Data Collection in Secondary Analysis" in Flick, U. (ed.) *The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection*. London: SAGE Publication, hh. 164-181.
- Eksha, G., 2019, *Tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI Diresmikan*. Available at: <<https://mediaindonesia.com/read/detail/262018-tiga-komando-gabungan-wilayah-pertahanan-tni-diresmikan>>.
- Fravel, M., 2011, "China's Strategy in the South China Sea", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 33, No. 3, hh. 292-319.
- Hellendorff, B., dan T. Kellner, 2014, *Indonesia: A Bigger Role in the South China Sea*. Available at: <<https://thediplomat.com/2014/07/indonesia-a-bigger-role-in-the-south-china-sea/>>
- Ikeshima, T., 2013, "China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects" *Waseda Global Forum*, Vol.10, hh.17-50.
- Inayati, R. S., 2016, "Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik - LIPI*, Vol. 2, No. 1, hh. 35–49.
- Irwin, S., 2013, "Qualitative Secondary Data Analysis: Ethics, Epistemology and Context", *Progress in Development Studies*, Vol. 13, No. 4, hh. 295–306.
- Kapoor, K. dan F. Jensen, 2016, *Indonesia President Visits Islands on Warship, Makes Point to China*. Available at: <<https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-indonesia/indonesia-president-visits-islands-on-warship-makes-point-to-china-idUSKCN0Z909D>>.
- Keck, Z., 2014, *Indonesia Beefs Up Air Force in South China Sea* [Online]. Available at: <<https://thediplomat.com/2014/04/indonesia-beefs-up-air-force-in-south-china-sea/>>.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2017. Available at: <<https://jdih.maritim.go.id/id/peraturan-presiden-republik-indonesia-no-16-tahun-2017>>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014*, Available at: <<http://www.bphn.go.id/data/documents/10pr041.pdf>>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016*, Available at: <<https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/05/03/keputusan-menteri-pertahanan-republik-indonesia-nomor-kep-1255-m-xii-2015-tentang-kebijakan-pertahanan-negara-tahun-2016.html>>
- Laksmana, E. A., 2017, "Indonesian Sea Policy: Accelerating Jokowi's Global

- Maritime Fulcrum”, *Asia Maritime Transparency Initiatives*, hh. 3–5.
- Laksmana, E. A., 2019, “Drifting towards Dynamic Equilibrium: Indonesia’s South China Sea Policy under Yudhoyono”, in Fionna, U., Negara, D., and Simandjuntak, D. (ed.) *Aspirations with Limitations: Indonesia’s Foreign Affairs under Susilo Bambang Yudhoyono*, hh. 153–175.
- Laksmana, E. A., 2020, *Indonesia, Natuna and the Natuna Linchpin*. Available at: <<https://thediplomat.com/2020/02/indonesia-china-and-the-natuna-linchpin/>>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2013, *Kajian Kebijakan Alusista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Lundry, C., 2018, Assessing Indonesia’s Foreign Policy under Jokowi, *Asia Policy*, Vol. 13, No. 4, hh. 30-35.
- Marshall, A. R., 2014, *Remote, gas-rich islands on Indonesia’s South China Sea frontline*. Available at: <<https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-indonesia-natuna-insight/idUSKBN0GP1WA20140825>>
- McMillan dan Schumacher, 2001, *Research in Education: A Conceptual Introduction*. New York: Pearson Longman.
- McRae, D., 2019, “Indonesia’s South China Sea Diplomacy: A Foreign Policy Illiberal Turn?”, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 49, No. 5, hh. 759–779.
- Muhibat, S.F., 2018, “Nationalism, Sovereignty and Foreign Policy: Indonesia and the Disputes over the South China Sea” in Patunru, A. A., M. Pangestu, dan M.C. Basri, (ed.) *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*, Singapore: ISEAS Publishing.
- Ng, J., 2020, “*The Natuna Sea Incident: How Indonesia Is Managing Its Bilateral Relationship With China*”. Available at: <<https://thediplomat.com/2020/01/the-natuna-sea-incident-how-indonesia-is-managing-its-bilateral-relationship-with-china/>>.
- Oktavianti, T. I., 2020, “*Bakamla drives Chinese coast guard vessel off North Natuna waters*”. Available at: <<https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/13/bakamla-drives-chinese-coast-guard-vessel-off-north-natuna-waters.html>>.
- Prabowo, E., 2013, “Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik di Laut China Selatan”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 19, No. 3, hh. 118–129.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI.
- Rabbani, A., 2019, China’s Hegemony in the South China Sea, *World Affairs: The Journal of International Issues*, Vol. 23, No. 3, hh. 66-79.
- Riska, E., 2016, “Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna”, *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, Vol. 3, No. 2, hh. 33–47.
- Snyder, H., 2019, “Literature Review as A Research Methodology: An Overview and Guidelines”, *Journal of Business Research*, Vol. 104 (August), hh. 333–339.
- Sudirman, A., J.Mooy, M.F. Malutfi, R.A. Ramadhan, 2019, “Militaryising the

- Natuna Islands for Indonesia's Gunboat Diplomacy", *Central European Journal of International and Security Studies*, Vol. 13, No. 4, hh. 13–33.
- Sulaiman, Y., 2019, "What Threat? Leadership, Strategic Culture, and Indonesian Foreign Policy in the South China Sea", *Asian Politics and Policy*, Vol. 11, No. 4, hh. 606–622.
- Suwarno, P., S.H. Sumantri, dan F. Bahar, 2021, Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia dalam rangka Ketahanan Wilayah (Studi di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27, No.1, hh.65-89.
- Tiola, 2020, *Rising Tensions in Natunas: Test for Indonesia's New Defence Commands*, Available at: <<https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/rising-tensions-in-natunas-test-for-indonesias-new-defence-commands/#.XqUCGJMzYV>>.
- Tranfield, Denyer dan Smart, 2003, "Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review", *British Journal of Management*, Vol.14, hh. 207–222.
- United Nations (UN), 1982, *Convention on the Law of the Sea* [Online]. Available at: <https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf>
- United Nations (UN), 2010, *Unofficial translation of note verbale from the Permanent Mission of the Republic of Indonesia*, No. 480/POL-703/VII/10, United Nations, New York, 8 July, Available at: <http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf>
- Utami, S.T., 2022, "Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS dan Implementasinya pada Ketahanan Indonesia", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28, No. 2, hh. 199-221.
- Weatherbee, D. E., 2017, "Indonesia's Foreign Policy in 2016: Garuda Hovering", *Southeast Asian Affairs*, hh. 163–176.
- Webster dan Watson, 2002, Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *Management Information Systems Quarterly*, Vol. 26, No. 3.
- Wood, J. R., 2021, China's maritime strategy and national security in the South China Sea, *Journal of Intelligence and National Security*, Vol. 36, No. 3, hh. 444-450.
- Yarger, H. R., 2006, "Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy Model", *U.S. Army War College*, hh. 107–113.